

Nama : Binti Alviani

NPM : 2213031082

Mata Kuliah : Ekonomi Industri

Kelas C Pendidikan Ekonomi 2022

CASE STUDY

Soal dan Jawaban

Indonesia sedang menghadapi tantangan deindustrialisasi dini, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun meskipun pendapatan per kapita belum mencapai level negara maju. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan *Making Indonesia 4.0* sebagai upaya revitalisasi industri nasional, dengan fokus pada lima sektor prioritas: makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.

Namun, setelah lima tahun implementasi, pertumbuhan sektor-sektor tersebut belum signifikan. Sementara itu, negara-negara seperti Vietnam dan Bangladesh justru menunjukkan peningkatan pesat dalam sektor manufakturnya.

Pertanyaan:

1. **Analisislah** kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan *Making Indonesia 4.0* dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.
2. **Bandingkan** pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?
3. Berdasarkan hasil analisis Anda, **rancanglah** kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Jawaban:

1. Kegagalan melihat dampak signifikan pada sektor prioritas setelah lima tahun implementasi dapat dijelaskan melalui beberapa kerangka teori kebijakan industri:
 - a. *Market-failure vs capability-building* banyak kebijakan Industry 4.0 menekankan insentif teknologi dan digitalisasi (supply of technology) tanpa simultan

membangun kapabilitas manufaktur domestik (skill, manajemen, engineering, supplier upgrading) sehingga perusahaan lokal tidak mampu menyerap atau mengadaptasi teknologi tinggi.

- b. *Externalities dan industrial linkages* teori industrial upgrading menekankan perlunya penguatan linkages vertikal/horizontal agar nilai tambah dan spillover FDI dapat menular ke supplier lokal; bila insentif tidak dikaitkan dengan local content atau program supplier development, investasi asing mudah menjadi enclave tanpa multiplier effect.
 - c. *Kapasitas institusional dan governance* kebijakan komprehensif seperti Making Indonesia 4.0 memerlukan koordinasi lintas-kementerian, birokrasi yang mampu mengeksekusi dan evaluasi berkala; kelemahan governance, inkonsistensi regulasi, dan fragmentasi program mengurangi efektivitas implementasi.
 - d. *Komparatif advantage dan strategi catching-up* teori pembangunan industri menyatakan negara harus memadukan kebijakan jangka pendek (pemanfaatan tenaga kerja murah, insentif ekspor) dengan investasi jangka panjang pada R&D dan pengembangan kapabilitas; dokumen Making Indonesia 4.0 sendiri mengakui rendahnya pengeluaran R&D domestik, sehingga transformasi teknologi sulit berkelanjutan. Secara empiris, data dan analisis menunjukkan share manufaktur Indonesia menurun (tanda-tanda deindustrialisasi dini) sementara negara pesaing berhasil menarik FDI berbasis GVC yang memicu ekspor dan upgrading ini menandakan bahwa program 4.0 terlalu berfokus pada otomatisasi dan digital hype tanpa menangani masalah dasar: biaya logistik yang tinggi, inefisiensi energi, ketidaklengkapan rantai pasok domestik, dan kekurangan tenaga kerja terampil. Dengan kata lain, kebijakan kurang menyelesaikan *binding constraints* struktural yang menahan investasi manufaktur produktif.
2. Perbedaan kunci terletak pada urutan prioritas kebijakan, konsistensi pelaksanaan, dan fokus pada pembentukan kapabilitas dan linkages. Korea Selatan historisnya menerapkan model negara pembangunan (*developmental state*), kebijakan industrial terarah, proteksi terpilih untuk industri anak bangsa, alokasi kredit murah ke konglomerat strategis, investasi besar-besaran pada pendidikan, R&D, serta promosi ekspor yang konsisten semua diorganisir oleh negara yang kuat dan kohesif sehingga industrial upgrading berjalan sistematis. Vietnam dan Bangladesh lebih baru tetapi efektif menggunakan strategi yang sangat pragmatis: mereka menciptakan *enabling*

environment untuk FDI manufaktur berorientasi ekspor (kemudahan izin, kawasan industri/SEZ, insentif fiskal), sekaligus mengembangkan kapasitas untuk integrasi ke GVC Vietnam misalnya mengkombinasikan SEZ dan kebijakan menarik investor elektronik/otomotif sementara memastikan transfer teknologi melalui kondisi pengadaan lokal dan pelatihan tenaga kerja, Bangladesh mengeksekusi industrial policy yang fokus pada RMG (readymade garments) dengan fiscal incentives dan kebijakan ekspor yang agresif serta fokus pada pembiayaan dan kepatuhan standar ekspor. Kunci efektivitas mereka adalah *policy sequencing* (mulai dari menarik investasi yang dapat cepat menciptakan lapangan kerja dan ekspor, sambil secara bertahap membangun kapabilitas lokal dan supplier development), koordinasi lintas lembaga, konsistensi jangka panjang, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan pelajaran lapangan. Indonesia, sebaliknya, seringkali menghadapi fragmentasi kebijakan, volatilitas regulasi, biaya logistik dan energi tinggi, serta investasi R&D yang rendah maka insentif Industry 4.0 tidak serta merta diterjemahkan menjadi peningkatan kapasitas manufaktur domestik yang berkelanjutan.

3. Rancangan kebijakan industri alternatif kontekstual untuk Indonesia keluar dari jebakan deindustrialisasi dini rasional dan instrumen. Prinsip dasar yaitu kebijakan harus terurut (*sequenced*), terintegrasi (*linkages & capability building*), dan bersifat *selective but systemic* artinya memilih subsektor dengan potensi komparatif nyata namun dibarengi instrumen lengkap untuk membangun ekosistem.
 - a. Fokus subsektor berbasis GVC dengan efek spillover tinggi: prioritaskan subsektor dalam lima prioritas yang menunjukkan potensi linkages (mis. elektronik komponen tertentu, komponen otomotif, makanan olahan bernilai tambah, tekstil bernilai tambah). Rasional: mempercepat ekspor dan memanfaatkan permintaan global.
 - b. SEZ/Industrial Park + Local Content & Supplier Development: perluasan SEZ/park berorientasi pada clustering industri dengan fasilitas logistik, listrik murah, dan one-stop services; syarat insentif fiskal dikaitkan dengan target local procurement dan program upgrading supplier (pelatihan, akses pembiayaan untuk UKM pemasok). Instrumen: insentif fiskal bertahap yang disyaratkan pencapaian linkages; matching grants untuk program upgrading supplier.
 - c. Skema insentif terikat kapabilitas (*performance-based incentives*): alih-alih tax holiday umum, berikan insentif yang terkait penciptaan nilai lokal, serapan tenaga

kerja terampil, R&D lokal, dan ekspor. Rasional: mendorong investor untuk berkontribusi pada pembangunan kapabilitas.

- d. Investasi besar pada human capital & vocational training yang dipangkas ke kebutuhan industri: skema apprenticeship, pusat kompetensi sektor (industry training centers) yang dikembangkan bersama industri (dual-training), didukung insentif pengusaha yang mempekerjakan lulusan pelatihan. Rasional: mengurangi mismatch skill yang menghambat adopsi teknologi.
- e. R&D dan teknologi adaptasi (catching-up): tingkatkan R&D publik-swasta melalui tax credit R&D, program kolaborasi universitas-industri, dan dana kompetitif untuk inovasi aplikasi industri 4.0 yang relevan dengan kondisi lokal (bukan hanya impor solusi black-box). Rasional: membangun kapasitas adaptif, bukan sekadar membeli mesin.
- f. Infrastruktur murah & biaya logistik rendah: program pengurangan biaya logistik (percepatan pelabuhan, rel kereta ke kawasan industri, energi dengan harga kompetitif) karena biaya produksi yang tinggi adalah penghalang investasi manufaktur.
- g. Pembiayaan inklusif bagi UKM dan klaster: skema kredit terjamin (kredit modal kerja, kredit peralatan) dan dana matching untuk upgrade teknologi di supplier kecil; dukungan koperasi supplier untuk skala pembelian dan negosiasi.
- h. Kebijakan eksternal untuk menarik FDI berkualitas: targeting investor dengan kapasitas transfer teknologi dan komitmen lokal procurement; perjanjian investasi mengikat deliverables (training, local sourcing roadmaps).
- i. Institusional: koordinasi nasional-lokal & monitoring berbasis indikator: bentuk unit pelaksana lintas-kementerian dengan otoritas kebijakan, dashboard KPI (share manufaktur GDP, lokal content ratio, R&D/GDP, ekspor manufaktur per subsektor) dan evaluasi berkala untuk menyesuaikan instrumen.
- j. Pendekatan pilot teritorial (learning by doing): jalankan paket kebijakan terintegrasi pada 2–3 kawasan (pilots) untuk mereplikasi model yang berhasil secara bertahap. Rasional keseluruhan: kombinasi insentif ekonomi + syarat kinerja + investasi kapasitas domestik akan mengatasi keterbatasan supply-side (skill, teknologi, supplier) sekaligus memastikan investasi yang masuk benar-benar menciptakan spillover dan tidak sekadar enclave. Instrumen yang diusulkan selaras dengan bukti keberhasilan Vietnam/Bangladesh mereka menggabungkan SEZ/insentif ekspor dengan kapasitas upskilling dan integrasi ke GVC sementara Korea Selatan

menunjukkan pentingnya investasi jangka panjang pada R&D dan koordinasi negara-swasta. Keberhasilan memerlukan konsistensi kebijakan jangka panjang, pengukuran hasil berbasis indikator, dan fleksibilitas adaptif terhadap kondisi sektoral lokal. Implementasi harus disertai komitmen anggaran, reformasi birokrasi untuk one-stop service, dan keterlibatan aktif sektor swasta dalam desain pelatihan serta program supplier development.